



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : LEGISLATIF  
**LEMBAGA** : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUFMI DASCO AHMAD**
2. Jabatan : **WAKIL KETUA DPR RI**
3. NHK : **196599**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **20.048.278.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m<sup>2</sup>/90 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.001.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m<sup>2</sup>/232 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.235.386.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 261 m<sup>2</sup>/271 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.185.854.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 261 m<sup>2</sup>/271 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.225.538.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m<sup>2</sup>/110 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.650.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m<sup>2</sup>/135 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 206 m<sup>2</sup>/225 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 4.250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **2.587.000.000**

1. MOBIL, LEXUS RX 200 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 1.422.000.000
2. MOBIL, LEXUS LEXUS ES 300 H Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 1.165.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **294.239.900****D. SURAT BERTAHAP** Rp. **625.000.000****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **21.835.333.339**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	2.005.200.000
Sub Total	Rp.	47.395.051.239
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	47.395.051.239

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.